



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaripudin

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

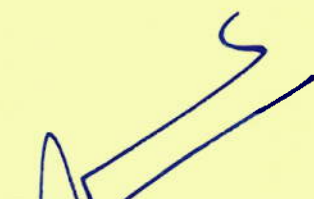
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Dan Energi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaripudin
NIP 197301011992031004

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : Syaripudin
NIP : 197301011992031004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan Penggunaan Daya Listrik dari Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	Sistem Perencanaan Tahunan	Daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang bersumber dari energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan (energi baru terbarukan). Dasar Hukum: 1. Perpres 22 Tahun 2017 tentang RUEN; 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050; 4. Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Metode Pengukuran: Penjumlahan kapasitas Pembangkit EBT (PLTS, PLTSa, PLTB, dll)	N/A	N/A	N/A	46	46	MegaWatt
2	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja yang Adaptif terhadap Perubahan Teknologi dan Tantangan Global	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Sistem Perencanaan Tahunan	Persentase peningkatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai	N/A	N/A	N/A	4	4	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Dasar Hukum: 1. UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus ; 2. UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik; 3. Permenakertrans Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas. Metode Pengukuran: Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah tahun (n) = (Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n) – Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n-1)) / Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n-1) x 100%. Keterangan: 1. Produktivitas Tenaga Kerja Tahun n = PDRB (ADHK) DKI Jakarta Tahun n/ Penduduk Yang Bekerja tahun n. 2. PDRB (ADHK) = Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan TW I-III Tahun n, ditambah Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan TW IV Tahun n (untuk realisasi bulan Januari tahun n+1). 3. PDRB = Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun n, diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta. 4. Penduduk Yang Bekerja = Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Tahun n (Agustus), diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta.	N/A	N/A	N/A	4	4	Persen
3	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran untuk Mendukung	Persentase Transmigran yang mengalami Peningkatan Peningkatan	Sistem Perencanaan	Kesejahteraan ekonomi transmigran dilihat dari kepemilikan rumah dan lahan di lokasi transmigran;	N/A	N/A	N/A	70	70	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
	Perekonomian Daerah	Kesejahteraan Ekonomi di Wilayah Penempatan Transmigrasi	Tahunan	kepala keluarga transmigran yang mengalami perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan saat awal penempatan, yang diukur berdasarkan kepemilikan aset (rumah atau lahan) dan/atau telah memulai usaha yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, dalam kurun waktu tertentu setelah penempatan. Dasar Hukum: 1. UU No. 29 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN 2. PP No 19 tahun 2024 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Metode Pengukuran: (Jumlah Transmigran yang ditempatkan di tahun sebelumnya (x-1) yang telah memiliki rumah dan memulai usaha di tahun berjalan (x)) / (jumlah trans yang diberangkatkan di tahun sebelumnya (x-1)) × 100%	N/A	N/A	N/A	70	70	Persen
Sasaran Relevan Lainnya										
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang	25	25	25	25	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						
5	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional :	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan
Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



Syarifudin
NIP 197301011992031004

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran Untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase Transmigran Yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Di Wilayah Penempatan Transmigrasi	70	RA1. Melakukan penyusunan Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi	KK1.1. Terlaksananya penyusunan Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi	T/O1.1.1. Penyusunan Naskah Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Daerah Tujuan transmigrasi	1 Naskah Kerja Sama	TW I
				RA2. Melakukan monitoring Kerja Sama Antar Daerah	KK2.1. Terlaksananya Monitoring Kerja Sama Antar Daerah	T/O2.1.1. Pelaksanaan Monitoring Kerja Sama Antar Daerah	1 Kali	TW III
				RA3. Melakukan pemetaan dan seleksi calon transmigran	KK3.1. Terlaksananya pemetaan dan seleksi calon transmigran	T/O3.1.1. Pelaksanaan pemetaan dan seleksi calon transmigran	1 Dokumen	TW IV
2	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Yang Adaptif Terhadap Perubahan Teknologi Dan Tantangan Global	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	4	RA1. Mengimplementasikan fitur job fair virtual pada platform karir.jakarta.go.id	KK1.1. Tersedianya dan berfungsinya fitur job fair virtual pada platform karir.jakarta.go.id	T/O1.1.1. Jumlah pelaksanaan job fair virtual	5 Kali	TW II
						T/O1.1.2. Jumlah pelaksanaan job fair virtual	5 Kali	TW III
						T/O1.1.3. Jumlah pelaksanaan job fair virtual	5 Kali	TW IV
					KK1.2. Penyebarluasan informasi job fair virtual kepada stakeholder terkait kepada dunia usaha dan pencari kerja	T/O1.2.1. Terbentuknya Surat Edaran Kepala Dinas	1 Surat Edaran Kepala Dinas	TW II
					KK1.3. Terlaksananya proses temu kerja (job matching) secara daring antara pencari kerja dan dunia usaha	T/O1.3.1. Dokumen Analisis Pasar Kerja (interaksi pemberi kerja dan pencari kerja) dari job matching pada platform karir. jakarta.go.id	1 Dokumen	TW IV
				RA2. Menyusun kurikulum pelatihan kerja	KK2.1. Tersusunnya kurikulum	T/O2.1.1. Jumlah dokumen	1 Dokumen	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				berstandar internasional yang mengintegrasikan kebijakan triple skilling	pelatihan kerja berstandar internasional yang mengintegrasikan skilling, reskilling, dan upskilling	kurikulum pelatihan kerja berstandar internasional yang tersusun		
						T/O2.1.2. Jumlah dokumen kurikulum pelatihan kerja berstandar internasional yang tersusun	1 Dokumen	TW IV
				RA3. Melaksanakan pelatihan bagi calon tenaga kerja	KK3.1. Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja bagi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	T/O3.1.1. Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja sebanyak 7000 orang (termasuk peserta penyandang disabilitas)	2500 Orang	TW II
						T/O3.1.2. Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja sebanyak 7000 orang (termasuk peserta penyandang disabilitas)	3200 Orang	TW III
						T/O3.1.3. Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja sebanyak 7000 orang (termasuk peserta penyandang disabilitas)	1300 Orang	TW IV
					KK3.2. Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri	T/O3.2.1. Jumlah peserta pelatihan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan sebanyak 3500 orang	300 Orang	TW I
						T/O3.2.2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan sebanyak 3500 orang	1350 Orang	TW II
						T/O3.2.3. Jumlah peserta	1450 Orang	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						pelatihan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan sebanyak 3500 orang		
						T/O3.2.4. Jumlah peserta pelatihan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan sebanyak 3500 orang	400 Orang	TW IV
					KK3.3. Mengintegrasikan data calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan ke dalam sistem informasi ketenagakerjaan	T/O3.3.1. Data peserta pelatihan keterampilan kerja dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan	1 Dokumen	TW IV
				RA4. Menyelenggarakan Pra kerja bagi lulusan setara SMA/SMK	KK4.1. Terlaksananya program Pra kerja bagi lulusan SMA sederajat bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri	T/O4.1.1. Jumlah Peserta Pra kerja bagi lulusan SMA sederajat bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri	1000 Orang	TW II
					KK4.2. Meningkatnya kompetensi lulusan SMA/SMK peserta Pra kerja sesuai bidang keahlian	T/O4.2.1. Persentase peningkatan kompetensi lulusan SMA/SMK peserta Pra kerja sesuai bidang keahlian yang mendapatkan sertifikat Pra kerja	100 Persen	TW IV
					KK4.3. Terserapnya lulusan SMA/SMK peserta Pra kerja ke dunia kerja setelah menyelesaikan program Pra kerja	T/O4.3.1. Persentase terserapnya lulusan peserta Pra kerja yang telah selesai mengikuti program Pra kerja ke dunia kerja	70 Persen	TW IV
				RA5. Pelaksanaan bursa kerja/jobfair di provinsi dan kota/kabupaten	KK5.1. Terlaksananya bursa kerja/jobfair di Provinsi dan Kota/Kabupaten	T/O5.1.1. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair	5 Kali	TW II
						T/O5.1.2. Jumlah pelaksanaan	5 Kali	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						bursa kerja/jobfair		
						T/O5.1.3. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair	5 Kali	TW IV
					KK5.2. Terlaksananya bursa kerja/jobfair khusus disabilitas	T/O5.2.1. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair khusus disabilitas	1 Kali	TW IV
					KK5.3. Terlaksananya bursa kerja/jobfair di satuan pendidikan	T/O5.3.1. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair di satuan pendidikan	2 Kali	TW II
						T/O5.3.2. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair di satuan pendidikan	2 Kali	TW III
						T/O5.3.3. Jumlah pelaksanaan bursa kerja/jobfair di satuan pendidikan	2 Kali	TW IV
				RA6. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK6.1. Ditetapkannya Program Strategis oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat (Program Pra Kerja)	T/O6.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW II
						T/O6.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW II
						T/O6.1.3. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
3	Meningkatkan Penggunaan Daya Listrik Dari Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan	Jumlah Daya Dari Energi Terbarukan	46	RA1. Melaksanakan audit energi bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	KK1.1. Terlaksananya audit energi pada bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	T/O1.1.1. Jumlah Pelaksanaan Kontrak Audit Energi	10 Gedung	TW III
					KK1.2. Tersusunnya hasil audit energi bangunan gedung sebagai dasar rekomendasi efisiensi energi	T/O1.2.1. Kajian Audit Energi di 10 Gedung	1 Kajian	TW IV
					KK1.3. Tersedianya rekomendasi penerapan teknologi hijau dan langkah efisiensi energi pada bangunan gedung	T/O1.3.1. Rekomendasi penerapan teknologi hemat energi pada 10 gedung	1 Dokumen Rekomendasi	TW IV
				RA2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada perangkat daerah	KK2.1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	T/O2.1.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konservasi energi	1 Kali	TW III
						T/O2.1.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konservasi energi	1 Kali	TW IV
				RA3. Penerapan konservasi energi kepada penyelenggara bangunan gedung dan swasta/privat	KK3.1. Terlaksananya Penerapan Konservasi Energi pada bangunan baik gedung pemerintah maupun gedung swasta/privat	T/O3.1.1. Surat Edaran Kepala Dinas untuk melakukan penerapan konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta	1 Surat Edaran	TW III
						T/O3.1.2. Diseminasi Penerapan Konservasi Energi pada gedung pemerintah maupun swasta (Penerapan Pergub Nomor 5/2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung)	1 Kali	TW IV
				RA4. Peningkatan kapasitas daya listrik PLTS atap di aset pemerintah daerah	KK4.1. Meningkatnya kapasitas terpasang Pembangkit Listrik	T/O4.1.1. Pelaksanaan Kontrak	1 Dokumen	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Tenaga Surya (PLTS) Atap pada aset Pemerintah Daerah	PLTS pada 5 gedung	Kontrak	
						T/O4.1.2. Pembangunan PLTS pada 5 Gedung	5 Gedung	TW IV
					KK4.2. Terlaksananya pemeliharaan PLTS yang telah terbangun pada bangunan milik Pemerintah Daerah	T/O4.2.1. Pelaksanaan Pemeliharaan PLTS pada bangunan milik Pemerintah Daerah	40 Gedung	TW IV
				RA5. Memperluas Jaringan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik	KK5.1. Tersedianya konsep pengembangan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik	T/O5.1.1. Kajian pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	1 Kajian	TW III
						T/O5.1.2. Diseminasi Hasil Kajian Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	1 Kali	TW IV
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK		
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV
5	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	1 Data	TW I
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 Data	TW I
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 Persen	TW IV

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syarifuddin
NIP 197301011992031004